

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Gerakan Sosial

Membahas suatu konsep Gerakan Sosial (*Social Movement*), perlu dimulai dengan kejelasan konsep tersebut sehingga dapat diperoleh batasan dan koridor yang dimaksud dari konsep tersebut. Menurut Sujatmiko sebelum masuk dalam konsep teori gerakan sosial secara utuh, peneliti akan menguraikan apa yang dimaksud sebagai gerakan dan apa itu sosial (Sukmana, 2016).

Gerakan sosial terdiri dari dua suku kata, yaitu gerakan dan sosial. secara sederhana gerakan adalah perbuatan, usaha, atau kegiatan dalam keadaan bergerak. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), sedangkan kata sosial menurut Fahri, adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola berhubungan para individu tersebut (Pratiwi, 2020). Selaras dengan hal tersebut, Enda mengatakan bahwa kata sosial diartikan sebagai cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Dalam pendefinisian dua suku kata antara gerakan dan sosial dapat diambil benang merah bahwa gerakan sosial adalah perbuatan antara satu individu dengan individu lain yang saling berhubungan dengan pola interaksi tertentu (Suhada, 2016).

Tulisan-tulisan tentang gerakan sosial mulai banyak berkembang khususnya pada akhir abad-19 dan sepanjang abad-20, gerakan sosial banyak

membahas tentang perilaku masyarakat yang melakukan aksi-aksi bersama dengan membawa corak gerakan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Menurut Macionis, gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. (Sukmana, 2016). Sementara menurut Tilly (1997) sebetulnya tantangan yang berkesinambungan terhadap kuasa yang dominan dengan melibatkan interaksi yang ajeg diantara para penantang, kepentingan, serta publik secara luas. Sementara menurut Tarrow (1998) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok lawan (Triwibowo, 2016).

Dari tiga pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapat dilihat bahwa gerakan sosial mencakup spektrum yang luas, dari mulai mencakup gerakan anti, seperti anti narkoba, anti korupsi, atau anti rokok, kemudian mencakup gerakan pro, seperti pro demokrasi, pro penegakan HAM, hingga pro LGBT, kemudian mencakup gerakan lain seperti gender, nelayan, kesejahteraan dan lain-lain (Syawaludin, 2017). Soenyono membuat peta tentang ciri-ciri gerakan sosial berdasarkan aspek : bentuk, tujuan, lingkup, metode, dan sifatnya. Peta tentang ciri-ciri gerakan sosial adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Peta Ciri-Ciri Gerakan Sosial (*Social Movement*)
Berdasarkan Perspektif Beberapa Teoritis**

No.	Teoritis	Bentuk	Tujuan	Lingkup	Metode	Sifat
1.	Wilson	Kolektivitas yang terorganisir.	Berusaha melakukan perubahan	Ruang lingkup wilayah yang luas	Menggunakan non-institusional.	Tidak membatasi orang.
		Kelompok	Membawa	-	-	-

2.	Fainstein	Bentukan.	inovasi			
3.	Herper	1.Salah satu proses dasar yang menghasilkan perubahan sosial; 2.Sebagai sumber atau membawa inovasi khususnya dalam bidang non-teknis.	-	-	-	-
4.	Di Renzo	Sebagai perilaku sebagian anggota masyarakat.	-	-	-	-
5.	Cook, dkk.	Suatu kelompok organisasi.	-	-	-	-
6.	Shiraishi	Alat ekspresi politik rakyat.	-	-	-	-
7.	Baldrige	Perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi.	-	-	Melalui aktivitas politik atau pendidikan.	Memiliki struktur organisasi yang jelas, serta mempunyai suatu ideologi yang berorientasi pada perubahan
8.	Killian	Perilaku kolektif.	-	-	-	Punya nilai, antar anggota diikat oleh kesadaran diri, punya norma, dan struktur yang mengenai pembagian tugas antara pemimpin dan pengikut.
9.	McAdam	Perilaku kolektif.	-	Melampaui batas wilayah batas Negara.	Melalui aktivitas politik.	Dipengaruhi oleh peluang politik, struktur mobilisasi..

(Sumber : Sukmana, 2016)

Pemikir teori gerakan sosial dalam perkembangannya dari waktu ke waktu mulai merumuskan dan memetakan secara detail dengan seiring banyaknya kejadian yang terkait dengan perubahan pola terbentuknya gerakan sosial di tengah-tengah masyarakat. Secara umum tradisi teoritis studi tentang gerakan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: Klasik, Neo-Klasik, dan Gerakan Sosial Baru (Kontemporer). Selanjutnya Singh menjelaskan bahwa

tradisi gerakan sosial klasik meliputi sebagian besar studi-studi dalam perilaku kolektif seperti: kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riot*), dan penolakan atau pembangkangan (*rebel*) (Singh, 2010).

Dalam tradisi klasik, akar konseptual gerakan sosial dan tindakan kolektif sebagian terletak dalam tradisi psikolog klasik sebelum tahun 1950-an, yang merupakan sebuah studi tentang perilaku kelompok dalam situasi-situasi ekstrem pada kehidupan masyarakat, kemudian memberikan paradigma yang berpengaruh dalam penekannya tentang stres dan dampaknya bagi manusia dalam ilmu sosial. Sementara tradisi gerakan sosial neo-klasik dihubungkan dengan tradisi utama Gerakan Sosial lama (*Old Social Movements*). Kebanyakan tulisan dalam tradisi neo-klasik dipublikasikan setelah tahun 1950-an, tradisi ini banyak terfokus pada gerakan bercorak dialektika Marxis yang berfokus pada pertentangan kelas antara kaum pemodal dan buruh (Singh, 2010).

Dalam perpektif ketiga menurut Singh yaitu Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), muncul sekitar era tahun 1970-an terutama di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Munculnya perspektif ini dipicu banyaknya gerakan dalam skala besar yang mengusung isu-isu yang mendasarkan pada aspek humanis, kultural, dan non-materialistik, tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari gerakan ini secara mendasar bersifat menyeluruh atau universal yang menekankan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik lagi.

1. Tahapan Gerakan Sosial

Singh (2010) mengatakan bahwa gerakan sosial tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya situasi

konflik dan ketimpangan di dalam masyarakat. Berangkat dari apa yang dijelaskan oleh Singh, dapat kita cermati bahwa kausalitas di dalam kemunculan gerakan sosial, kausalitas tersebut menghadirkan pemahaman bahwa gerakan sosial terjadi tidak terjadi begitu saja namun ada tahapan demi tahapan yang terjadi di dalam realitas sosial. Beberapa ahli merumuskan tahapan gerakan sosial, diantaranya adalah Henselin, menurut Henselin, dirumuskan bahwa tahapan gerakan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Kerusuhan dan Agitatif. Bermula dari sekelompok orang yang merasa terganggu oleh kondisi tertentu dan hendak mengubahnya. Muncul pemimpin yang mampu menerjemahkan perasaan orang-orang ke dalam bentuk wacana yang menyangkut sejumlah isu yang berhubungan dengan sebab ketergangguan tersebut. Kebanyakan gerakan gagal pada tahap ini, sebab gagal mendapatkan dukungan, setelah gejolak kegiatan yang singkat, gerakan mati secara perlahan.
- b. Tahap Mobilisasi Sumber Daya. Tahapan pertama gerakan bisa dilalui jika mampu memobilisasi sumber daya seperti waktu, dana, keterampilan orang, dan untuk mendapatkan perhatian media massa. Dalam beberapa kasus, muncul kepemimpinan setempat yang mampu memobilisasi sumber daya.
- c. Tahap Pengorganisasian. Tahapan ini ditandai adanya pembagian kerja, pemimpin memutuskan suatu kebijakan dan perangkat struktur yang ada melaksanakan tugas sehari-hari yang diperlukan agar gerakan

tetap berjalan. Dalam tahap ini masih banyak ditemui kegairahan kolektif terhadap isu yang menjadi pusat perhatian.

- d. Tahap Institusionalisasi. Pada tahap ini gerakan telah mengembangkan suatu birokrasi. Kontrol berada di tangan para pejabat karier, yang mungkin lebih mementingkan kepentingan atau posisi mereka sendiri ketimbang pencapaian tujuan pergerakan itu sendiri. Pada tahap ini kegairahan politik mulai berkurang.
- e. Tahapan Kemunduran dan Kemungkinan Kebangkitan Kembali. Manajemen kegiatan sehari-hari mendominasi kepemimpinan, juga ditandai dengan perubahan sentimen politik dan tidak ada lagi kelompok orang yang mempunyai komitmen kuat dan berbagai suatu tujuan bersama. Jika itu ditemukan, maka gerakan sosial berpeluang redup dan terus menghilang, pada saat redup dimungkinkan juga muncul pemimpin yang lebih idealis dan berkomitmen tinggi untuk menyegarkan gerakan (Damsar, 2010).

Sementara itu dalam penjelasan yang lebih jelas dan ringkas dirumuskan oleh Macionis, menurut Macionis, menjelaskan bahwa tahapan gerakan sosial adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. *Emergence* (Tahap Kemunculan).

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik (*all is not well*). Beberapa gerakan perempuan dan hak asasi sipil, misalnya, muncul karena penyebaran ketidakpuasan (*spread dissatisfaction*), sementara gerakan yang lainnya muncul sebagai

kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil tentang isu tertentu. Misalnya, aktivis Gay yang melakukan inisiatif kepedulian publik akan bahaya ancaman AIDS.

b. *Coalescence* (Tahap Penggabungan).

Setelah kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk “menuju publik” (*going public*). Pemimpin harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan rekrutmen keanggotaan baru. Dalam tahap ini, gerakan mungkin akan terlibat dalam tindakan kolektif (*collective action*) seperti demonstrasi untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Gerakan juga dimungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan.

c. *Bureaucratization* (Tahap Birokratisasi).

Agar menjadi sebuah kekuatan politik, suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokratis. Dengan demikian, gerakan akan menjadi mapan (*established*), ketergantungan terhadap karisma pemimpin akan sedikit menurun karena akan digantikan oleh staf yang mumpuni. Apabila suatu gerakan sosial tidak menjadi mapan, maka akan berisiko mudah hilang.

d. *Decline* (Tahap Penurunan/Kemunduran).

Pada akhirnya, suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Macionis meyakini ada lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami kemunduran, yakni :

- a. Aktivitas suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuannya;
- b. Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi;
- c. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan;
- d. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan, terutama dari pihak eksternal;
- e. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarustamaan. Beberapa gerakan dapat diterima ke dalam bagian dari suatu sistem, sehingga tidak ada tentangan atas *status quo* (Sukmana, 2016).

2. Tipologi Gerakan Sosial

Dalam proses pemahaman dan perumusan konsep gerakan sosial, terdapat banyak ahli yang membahas tentang tipologi gerakan sosial sesuai dengan pengamatannya terhadap fenomena gerakan sosial. Beberapa pandangan dikemukakan oleh ahli diantaranya, Horton dan Hunt menemukan ada enam bentuk dari gerakan sosial, yaitu :

- a. Gerakan Perpindahan (*Migratory Movement*), yaitu arus perpindahan penduduk ke suatu tempat yang baru. Ketika pengamat Islam tidak disukai dan dimusuhi oleh penduduk Makkah pada perkembangan awalnya, Rasulullah menganjurkan agar penganut orang Muslim yang ada di Makkah hijrah (pindah) ke kota Madinah untuk menghindari penganiayaan, diskriminasi, dan penekanan yang lebih besar. Hijrah tersebut dapat dipahami sebagai perpindahan. Atau arus pengungsian besar-besaran orang Vietnam Selatan ke Pula Galang pada masa perang Vietnam juga merupakan bentuk dari gerakan sosial dalam bentuk gerakan perpindahan.
- b. Gerakan Ekspresif (*Expressive Movement*), merupakan gerakan yang merubah ekspresi, sikap atau reaksi terhadap kenyataan, dan bukannya merubah kenyataan (masyarakat) itu sendiri. Terdapat berbagai macam gerakan ekspresif seperti musik, puisi, drama, lawakan, lelucon, aliran kepercayaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Misalnya, berbagai lelucon tentang politik muncul dalam masyarakat Rusia ketika masih bernama Uni Soviet.
- c. Gerakan Utopia (*Utopian Movement*) adalah gerakan untuk menciptakan suatu masyarakat sejahtera dalam skala terbatas. Model tersebut dapat dicontoh dan dimungkinkan untuk dikonstruksi dalam skala lebih besar. Misalnya, gerakan Kibut Israel, gerakan Darul Arqam Malaysia, dan lain sebagainya.

- d. Gerakan Reformasi (*Reform Movement*), yaitu gerakan yang berusaha untuk memperbaiki beberapa kepincangan dalam masyarakat. Gerakan ini biasanya muncul di negara demokratis, gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 merupakan contoh bagaimana gerakan itu terjadi untuk memperbaiki kepincangan yang terjadi dalam kehidupan berekonomi, politik, dan sosial-budaya. Melalui gerakan ini banyak perubahan yang bisa dirasakan secara langsung seperti pemilihan presiden secara langsung pada pemilu 1999.
- e. Gerakan Revolusioner (*Revolutionary Movement*), yaitu gerakan yang dibangun untuk menggantikan sistem yang ada dengan sistem yang baru. Para penganut gerakan ini, menurut Horton dan Hunt, cenderung berseberangan dengan penganut gerakan reformasi, karena mereka meyakini bahwa reformasi yang berarti tidak mungkin terjadi bilamana sistem yang ada tetap bertahan. Mereka berpendapat bahwa perubahan radikal dan mendasar hanya dapat terlaksana apabila sistem sosial yang ada sekarang diganti dengan yang baru serta kelompok elite yang ada disingkirkan dan diputus mata rantai sirkulasinya. Selanjutnya, persaingan antarkelompok dalam perebutan kekuasaan terjadi.
- f. Gerakan Perlawanan (*Resistance Movement*), yaitu gerakan yang bertujuan untuk menghambat atau menghalangi suatu perubahan sosial tertentu. Perubahan sosial yang terjadi selama ini tidak saja membahagiakan, tetapi juga menakutkan banyak orang. Perubahan pandangan tentang nilai, norma, dan sikap sekelompok orang dalam masyarakat, seperti seks bebas,

pornografi, feminisme, sekularisme, dan lain sebagainya telah menimbulkan ketidaknyamanan bahkan ketakutan yang dialami oleh kelompok lainnya. Kelompok orang yang disebut terakhir ini melakukan suatu gerakan perlawanan dengan mengatasnamakan agama, tradisi, sejarah, moralitas, adat, kebebasan dan lainnya sehingga lahirnya misalnya berbagai gerakan anti (pornografi, narkoba, atau seks bebas) atau gerakan pemurnian (kembali kepada ajaran agama, tradisi, moralitas) (Damsar, 2010).

Dalam mengkaji lebih dalam konsep gerakan sosial, Macionis mengklasifikasikan gerakan sosial berdasarkan dimensi perubahan (*who is changed*) dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan (*how much changed*), maka gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe yaitu :

- a. Gerakan Sosial Alternatif (*Alternative Social Movement*), yaitu gerakan sosial yang tingkat ancamannya terhadap *status quo* sangat kecil karena sasaran dari gerakan sosial ini adalah suatu perubahan yang terbatas terhadap sebagian populasi. Sebagai contoh, gerakan sosial *Promise Keepers*, yang ditujukan untuk mendorong laki-laki pemeluk Agama Kristen lebih taat dan lebih memperhatikan keluarga mereka.
- b. Gerakan Sosial Pembebasan (*Redemptive Social Movement*), yaitu gerakan sosial yang memiliki fokus selektif, tetapi ditujukan terhadap perubahan yang radikal (lebih mengakar) pada individu. Sebagai contoh, *Alcoholics Anonymous* yaitu sebuah organisasi yang

membantu orang-orang yang mengalami kecanduan alkohol agar mereka sembuh dan mampu hidup lebih baik.

- c. Gerakan Sosial Reformasi (*Reformative Social Movement*), yaitu tipe gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang. Gerakan sosial reformasi umumnya terjadi dalam suatu sistem politik, tipe gerakan sosial ini bisa bersifat progresif (mempromosikan gerakan sosial yang baru) dan bisa bersifat reaktif (*Countermovements* yang mencoba mempertahankan *status quo*). Sebagai contoh yaitu Multikulturalisme, adalah sebuah gerakan politik dan pendidikan yang melakukan advokasi terhadap orang-orang dari seluruh ras dan etnis tentang persamaan ras (*racial equality*).
- d. Gerakan Sosial Revolusi (*Revolutionary Social Movement*), yaitu gerakan sosial yang paling keras (ekstrim) dibandingkan tipe gerakan sosial yang lainnya, berjuang untuk untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat (Sukmana, 2016).

Dalam klasifikasi lain Spencer menyebutkan bahwa berdasarkan tujuannya, gerakan sosial dapat dibagi menjadi tujuh tipe gerakan sosial yaitu :

- a. Gerakan Revolusi (*Revolutionary Movement*), yaitu tipe gerakan yang dramatis, yang berusaha menggulingkan otoritas yang sudah mapan, apabila diperlukan bisa saja menggunakan kekerasan, misalnya gerakan bersenjata.

- b. Gerakan Reformasi (*Reform Movement*), yaitu gerakan yang ditujukan untuk mengoreksi atau memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul, misalnya gerakan perempuan dan gerakan pemenuhan hak-hak sipil.
 - c. Gerakan Reaksi (*Reactionary Movement*), yaitu suatu gerakan yang menginginkan situasi kehidupan kembali kepada tatanan masa lalu, menganggap bahwa tatanan lama lebih baik dari pada tatanan yang sekarang.
 - d. Gerakan Konservatif (*Concervative Movement*), yaitu suatu gerakan yang sederhana yang ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai tata cara kehidupan mereka, misalnya gerakan kelompok konservatif untuk mempertahankan bangunan lama dan memperlambat laju pertumbuhan dan perubahan kota besar.
 - e. Gerakan Utopia (*Utopian Movement*), yaitu suatu gerakan yang bertujuan jangka panjang, menginginkan suatu tipe baru dari suatu masyarakat yang berbeda saat ini.
 - f. Gerakan Religius (*Religious Movement*), yaitu suatu gerakan yang mempunyai tujuan religius, misalnya gerakan mistik.
 - g. Gerakan Etnis atau Nasionalis (*Ethnic or Nationalistic Movement*), yaitu tipe gerakan yang sangat penting dewasa ini dalam membuat suatu perubahan di seluruh dunia. Misalnya, *The Chikano, Black and American Indian Movements* (Damsar, 2010).
3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Gerakan Sosial

Menurut Locher terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan suatu gerakan sosial, menurutnya jika mengacu pada sejarah pola gerakan sosial di Amerika, maka ditemukan lima faktor atau karakteristik yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu gerakan sosial, yaitu :

a. Kepemimpinan Yang Efektif (*Effective Leadership*)

Syarat keberhasilan suatu gerakan sosial adalah harus memiliki pemimpin yang efektif (*effective leadership*), yaitu individu-individu yang memahami sistem hukum dan politik yang berfungsi efektif dalam diri mereka. Para pemimpin gerakan sosial memusatkan perhatian kepada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari kelompok. Mereka mengartikulasikan untuk menjelaskan kepada pihak-pihak luar (*outsider*) tentang rasionalitas dan tujuan kelompok. Hal yang paling penting dari pemimpin gerakan sosial adalah menginspirasi kepada orang lain untuk bertindak serta kemampuannya untuk mengajak orang-orang mengikuti aksi gerakan sosial. Kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan peluang bahwa setiap gerakan sosial akan berhasil dalam mencapai tujuan bersama.

b. Citra Positif (*Positive Image*)

Keberhasilan gerakan sosial adalah apabila dihargai (mendapat respek). Mereka berusaha untuk meyakinkan semua pihak termasuk para politisi dan pemegang otoritas bahwa mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang jujur yang hanya menginginkan suatu kebenaran. Citra publik tentang kelompok dan pemimpin kelompok

harus positif, kondisi seperti ini akan memudahkan mendapatkan dukungan keyakinan publik bahwa gerakan tersebut bersifat mulia.

c. Taktik yang Dapat Diterima Secara Sosial (*Socially Accepted Tactics*)

Keberhasilan gerakan sosial akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara sosial. bahwa taktik dan strategi yang dipilih dapat diyakini akan mampu dan efektif dalam rangka mencapai tujuan gerakan, kondisi tersebut akan memberikan dampak terhadap pembentukan rasa hormat dan citra positif dari publik.

d. Tujuan yang Dapat Diterima Secara Sosial (*Socially Acceptable Goals*).

Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila pihak luar (*outsider*) merasa yakin bahwa tujuan utama gerakan sosial adalah hanya untuk kepentingan masyarakat, dan tidak bermaksud merugikan kepentingan mereka. Para aktor gerakan sosial harus berusaha meyakinkan pihak pengamat bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan keuntungan jika gerakan sosial berhasil mendapatkan sebagaimana yang diinginkan. Gerakan sosial yang berhasil memiliki tujuan khusus jangka pendek dan jangka panjang, disatu sisi suatu gerakan sosial mungkin bicara tentang “membuat masyarakat lebih baik” (*making a better society*) atau “meningkatkan kehidupan” (*improving life*), akan tetapi upaya sehari-hari harus difokuskan kepada tahap-tahap nyata terhadap tujuan-tujuan ini sebagai suatu yang rasional.

- e. Pembudayaan Dukungan Politik dan Finansial (*Cultivated Financial and Political Support*).

Kebanyakan kelompok-kelompok gerakan sosial memperoleh dukungan politik dan dana dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi yang lainnya. Kebanyakan gerakan sosial yang berhasil, memadukan teknik dan peran mereka untuk menghindari keterasingan dari pendukung politik dan finansial potensial yang memungkinkan. Sementara gerakan sosial yang gagal, di lain pihak menyerang secara membabi buta semua orang termasuk pendukung potensial, baik politik maupun finansial (Sukmana, 2016).

2.2 Gerakan Sosial Baru

Pergeseran perubahan paradigma gerakan sosial dari gerakan sosial lama (*old social movement*) ke paradigma gerakan sosial baru (*new social movement*) tidak lain adalah karena objek kajian gerakan sosial yaitu masyarakat juga mengalami perubahan. Masyarakat yang mengalami perubahan tersebut akhirnya juga menyesuaikan dalam gerakannya secara sosial. Perubahan masyarakat dari modernisme ke post-modernisme, dari industrialisme ke post-industrialisme dan melebarnya jarak antara negara dan masyarakat sipil menampilkan bentuk baru di tengah masyarakat. Para pemikir yang mengamati fenomena sosial yang terjadi kemudian menyadari bahwa rumusan atau konsep sosial yang sebelumnya sudah mapan terus bergerak dan tidak lagi relevan untuk menjawab fenomena-fenomena yang terjadi, hal ini pula lah yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya konsep gerakan sosial baru (*new social movement*).

Meskipun pandangan tentang gerakan sosial baru (*new social movement*) sudah berlaku umum, para teoritis GSB memiliki cara pandang yang berbeda terhadap gerakan sosial baru (*new social movement*). Dalam pandangan Inglehar, Dalton, Burklin mengatakan bahwa Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) menekankan pada peranan nilai-nilai *post-materialist* dalam banyak tindakan kolektif, sebagai lawan dari tindakan konflik (Sukmana, 2016). Sementara menurut Singh (2010) mengatakan bahwa Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) adalah refleksi pemberontakan kultural individu kontemporer terhadap mekanisme kontrol dan pengawasan negara terhadap masyarakat. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) adalah respon terhadap ketidak berdayaan struktur politik dan ekonomi masyarakat pasca industrial, perspektif teori gerakan sosial baru lahir sebagai tanggapan terhadap perspektif Marxis karena menerjemahkan gerakan sosial semata-mata pada perjuangan kelas (Syawaludin, 2017).

2.2.1 Karakteristik Gerakan Sosial Baru

Para pemikir dalam pengamatannya merumuskan gerakan sosial baru untuk memudahkan identifikasi pada realitas sosial, menurut Pichardo mengungkapkan bahwa secara fundamental gerakan sosial baru memiliki karakteristik khusus dalam empat aspek, yaitu:

- a. *Ideology and Goals* (Tujuan dan Ideologi).

Faktor sentral karakteristik dari Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah pandangan ideologi yang berbeda. Paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) mencatat bahwa gerakan sosial kontemporer menekankan

kepada kualitas hidup dan gaya hidup (*quality of life and life-style concerns*). Gerakan sosial baru (GSB) mempertanyakan representasi dari demokrasi yang membatasi masukan dan partisipasi warganegara dalam pemerintahan. Sifat unik yang lainnya adalah ideologi dari Gerakan Sosial Baru (GSB) yang merupakan refleksi diri (*self-reffective character*), hal ini berarti partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan.

b. *Tactis* (Taktik).

Taktik dari Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan cerminan orientasi ideologi. Keyakinan dalam karakter yang tidak mewakili tentang demokrasi modern adalah konsisten dengan orientasi taktik anti institusi. Gerakan Sosial Baru (GSB) lebih suka untuk tetap berada di luar saluran politik normal, menggunakan taktik mengganggu (*disruptive tactics*) dan mobilisasi opini publik (*mobilizing public opinion*) untuk mendapatkan pengaruh politik. Oleh karena itu Gerakan Sosial Baru (GSB) cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan dengan representasi simbol dan kostum (*costumes and symbolic representations*).

c. *Structure* (Struktur).

Sikap anti-institusi dari Gerakan Sosial Baru (GSB) juga meluas kepada cara mereka mengatur. Gerakan Sosial Baru (GSB) berupaya untuk mereplikasi dalam struktur mereka sendiri jenis perwakilan

pemerintah yang mereka inginkan. Yaitu, mereka mengorganisir diri dalam gaya yang tidak kaku yang menghindari bahaya oligarki, mereka cenderung melakukan rotasi kepemimpinan, suara umum dalam semua isu, dan memiliki organisasi sementara yang tidak permanen. Mereka juga mendukung sikap anti-birokrasi, berdebat melawan dengan apa yang mereka anggap karakter dehumanisme dari birokrasi modern.

d. *Participants* (Partisipan).

Terdapat dua pandangan tentang siapa dan mengapa partisipan bergabung dalam suatu gerakan sosial baru. Basis pertama dukungan dari kelas menengah baru (*new middle class*), yakni sebuah strata sosial pekerja baru yang muncul dalam sektor ekonomi. Peningkatan kelas menengah baru dalam masyarakat pasca industri membangun basis dukungan Gerakan Sosial Baru (GSB). Strata ini memproduksi gerakan sosial baru apabila mereka tidak terikat pada motif keuntungan perusahaan atau tidak tergantung pada dunia usaha demi mempertahankan hidup mereka. Pandangan kedua tentang partisipan dalam gerakan sosial baru adalah bahwa mereka tidak didefinisikan oleh basis kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial. Basis partisipan gerakan sosial baru adalah ideologi, bukan etnis, agama, atau komunitas berbasis kelas (*class-based community*) (Sukmana, 2016).

Menurut Macionis, Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) memiliki karakteristik meliputi hal-hal berikut :

- a. Pertama, Sebagian besar gerakan sosial baru internasional saat ini memfokuskan perhatian kepada persoalan ekologi global, kedudukan sosial dari kaum wanita dan gay, hak-hak binatang, dan pengurangan risiko perang. Sebagai suatu proses dari globalisasi yang menghubungkan negara-negara di dunia yang menyebabkan gerakan sosial baru menjadi fenomena global.
- b. Kedua, gerakan sosial baru (*new social movement*) cenderung memfokuskan pada perubahan kultural dan perbaikan lingkungan sosial dan fisik. Sebagai contoh gerakan lingkungan internasional menentang praktek yang memperparah pemanasan global dan bahaya lingkungan lainnya.
- c. Ketiga, pada umumnya gerakan sosial baru (*new social movement*) mendapat dukungan tidak hanya golongan bawah tetapi juga dari golongan kelas menengah (*the middle-class*). Di Amerika Serikat dan di negara-negara maju lainnya, sejumlah kaum profesional yang berpendidikan tinggi, yang merupakan pendukung Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) (Sukmana, 2016).

Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) secara umum merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil, mereka membidik domain sosial “masyarakat sipil” membangkitkan isu-isu sehubungan dengan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari. Cohen mengatakan bahwa

Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) membatasi diri dalam empat pengertian, yaitu:

- a. Umumnya aktor-aktor Gerakan Sosial Baru tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia tak terjangkau di masa lalu.
- b. Akor-aktornya berjuang untuk otonomi, pluralitas, dan keberadaan tanpa menolak prinsip-prinsip egalitarian.
- c. Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu, untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran, kecuali dalam kasus fundamentalis Gerakan Sosial Baru.
- d. Para aktornya mempertimbangkan keberadaan formal negara dan pasar (Singh, 2010).

Dalam hal ini perasan dalam batasan tersebut berfokus pada tujuan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) yaitu, untuk menata kembali relasi negara, masyarakat dan perekonomian, dan menciptakan ruang publik yang di dalamnya wacana demokratis ihwal otonomi dan kebebasan individual dan kolektivitas serta identitas mereka bisa didiskusikan dan diperiksa selalu. Namun begitu, gerakan sosial yang sifatnya dinamis perlu dibaca dalam kerangka teoritis yang lebih jelas, dalam konsep gerakan sosial baru (*new social movement*) bahwa terdapat dua paradigma besar yang menjadi pisau analisis dalam menelaah gerakan sosial yang terjadi, yaitu Teori Mobilisasi Sumber Daya dan Teori Berorientasi Identitas (Singh, 2010).

Teori Mobilisasi Sumber Daya berakar pada tradisi ilmu sosial di Amerika Serikat, teori ini berangkat dari tesis dengan menolak penekanan pada peran “perasaan” dan “penderitaan” dalam pemanfaatan kategori psikologi. Teori mobilisasi sumber daya pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberchall, teori mobilisasi sumber daya memfokuskan perhatiannya kepada proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan, teori ini lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor ekonomi dan politik, serta kurang memberikan perhatian pada sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan. Teori mobilisasi sumber daya berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup untuk menimbulkan gerakan sosial. Partisipasi dalam gerakan ini dipandang bukan sebagai konsekuensi psikologis, melainkan hasil dari proses-proses rasionalisasi dimana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi (*reward and cost*) atas keterlibatannya dalam sebuah organisasi (Singh, 2010).

2.3 Teori Berorientasi Identitas (The Identity-Oriented Theory)

Teori gerakan sosial kontemporer yang berorientasi identitas merumuskan asumsi dasarnya melalui paparan sebuah kritik terhadap teori-teori sebelumnya. Menurut Singh teori berorientasi identitas (*the identity-oriented theory*) berada bersebrangan dengan penjelasan rasionalistik gerakan sosial kontemporer yang dirumuskan dan dipraktikkan oleh akademisi Amerika, terutama paparan dari teori mobilisasi sumber daya (*the resource mobilisation theory*). Teori berorientasi identitas yang berasal dan banyak dipraktikkan di Eropa bersifat non materialistik

dan ekspresif, berbeda dengan teori mobilisasi sumber daya yang memusatkan dan mementingkan kajiannya pada rasionalisme dan materialisme. Teori berorientasi identitas mengurai pertanyaan seputar integrasi dan solidaritas kelompok yang terlibat dalam gerakan sosial, teori ini menolak upaya teori mobilisasi sumber daya yang menekankan model neo-utilitarian untuk menjelaskan gerakan sosial (Singh, 2010). Paradigma berorientasi identitas merupakan perspektif pada peranan identitas yang melandasi semangat individu dan suatu gerakan yang bersifat non-materialistik tetapi berfokus pada perilaku ekspresif. Terdapat peluang umum bahwa gerakan berorientasi identitas dan aksi kolektif adalah ekspresi manusia dalam mencari identitas, otonomi, dan pengakuan (Fajriani dan Sugandi, 2019).

Dalam teori berorientasi identitas faktor determinan terjadinya gerakan sosial ditentukan oleh tiga hal, yaitu:

Pertama, Identitas Kolektif (*Collective Action*). Secara umum, identitas kolektif menjelaskan bahwa kelompok individu memiliki kepentingan (*interest*), nilai (*values*), perasaan (*feelings*) dan tujuan (*goals*) bersama. Identitas kolektif di dalamnya meliputi penekanan pada komitmen dari individu dan pada solidaritas dari kolektivitas serta menyoroti lebih luas struktur sosial dan dinamika yang memberikan *interest*, konteks politik, simbol kultur, tujuan, dan sebagainya. Menurut Holiinger, untuk membagi identitas dengan orang-orang lainnya, maka harus ada perasaan solidaritas di antara orang-orang tersebut. Solidaritas akan muncul dalam suatu kondisi dimana identitas kolektif terjadi. Identitas kolektif diekspresikan dalam materi kultural (*cultural materials*) seperti, nama (*names*),

narasi (*narratives*), simbol (*symbols*), ritual (*rituals*), pakaian (*clothing*) dan lain sebagainya (Sukmana, 2016).

Kedua, Solidaritas (*Solidarity*). Menurut Fireman dan Gamson, solidaritas adalah sesuatu yang menghubungkan anggota-anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Dukheim mengatakan bahwa fungsi sesungguhnya pembagian kerja adalah untuk menciptakan solidaritas antara pekerja satu dengan yang lainnya, Dukheim kemudian membagi dua tipe solidaritas yaitu, solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu padu karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dengan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya bahwa masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organis bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Solidaritas memiliki dua ciri, yaitu *corpus* atau ciri-ciri fisik (*body*) sebagai sarana untuk realitas identitas personal, lalu kemudian *spiritus* yaitu perasaan kolektif yang ada pada anggota kelompok (organisasi) (Sukmana, 2016).

Ketiga, Komitmen (*Commitment*). Mengacu pada kerelaan seseorang untuk mencapai syarat-syarat bagi suatu tindakan sosial, komitmen dapat dipandang sebagai identifikasi individual dengan kolektifitas yang mengarahkan kepada pelengkap instrumental, afektif, dan moral bagi investasi aktivitas gerakan. Meyer dan Allen mengungkapkan bahwa terdapat tiga karakteristik komitmen, yaitu komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen kontinuitas (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Komitmen afektif

adalah emosi positif keterikatan dengan organisasi, komitmen ini adalah komponen yang mendorong komitmen anggota dalam sebuah organisasi. Komitmen kontinuitas merupakan komponen kebutuhan atau keuntungan dibandingkan apabila tidak menjadi bagian dari kelompok, seseorang akan merasa rugi jika berada di luar kelompok. Komitmen normatif adalah alasan seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok karena perasaan sebagai sebuah kewajiban (Sukmana, 2016).

Dalam aplikasinya melalui metode perbandingan, jika dilihat dari teori-teori gerakan sosial yang lain teori berorientasi identitas ini memiliki kelebihan. Kelebihan dari perspektif berorientasi identitas adalah melibatkan aktor dan aksi yang dilakukan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga lebih tepat dibandingkan dengan teori-teori lainnya, berikut adalah kelebihan dari paradigma berorientasi identitas, yaitu:

- a. Secara umum, mendeskripsikan sebagian ekspresi kuat dari gerakan sosial baru di masyarakat modern yang banyak mengalami perubahan dalam mengungkapkan sesuatu.
- b. Ekspresi tatanan gerakan sosial baru melalui pandangan kelas dan mengurangi batasan kondisi material.
- c. Perilaku ekspresif menjadi fokus perhatian
- d. Secara substantif, peran dan posisi aktor-aktor modern bersama-sama berjuang dengan sadar dalam memerangi kekuasaan sosial dalam menciptakan identitas baru dan ruang demokratis aksi sosial yang lebih bebas

- e. Secara khusus, gerakan sosial baru meletakkan posisi pribadi sebagai kebersamaan yang bebas, manusia bebas dalam mengubah identitas dan mencari makna baru bagi identitasnya.(Fajriani dan Sugandi, 2019).

Paradigma berorientasi identitas dalam gerakan sosial baru menitikberatkan pada keterlibatan para aktor dan aksi kolektif, yang keduanya memiliki hubungan timbal balik dalam melahirkan tindakan baru. Aktor yang berarti sebagai masyarakat yang melaksanakan gerakan sosial baru dan aksi kolektif berarti tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama (Bakar, 2015).

2.4 Gerakan Mahasiswa

2.4.1 Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa memiliki kewajiban untuk membawa perubahan di manapun berada khususnya perubahan dalam lingkungan sosial-masyarakat. Mahasiswa menjadi pihak yang memiliki hubungan antara kehidupan masyarakat dengan negara sebagai pembuat kebijakan (Amri, 2023). Besarnya peran mahasiswa menjadikan mahasiswa sebagai salah satu elemen penting bagi perubahan sosial, menurut Amalia bahwa *Agent Of Change* atau Agen Perubahan adalah orang-orang yang membantu membuat perubahan. Sementara menurut Anwar dan Utamamenyatakan bahwa seorang agen perubahan akan menghubungkan objek perubahan dengan sistem sosial yang menjadi objek perubahan (Setyadi dkk., 2021).

Perguruan tinggi sebagai tempat mahasiswa menempuh pendidikan memainkan peranan penting dalam muatan belajarnya,

pendidikan yang maka akan membawa suatu agen perubahan (*agent of change*) yang membawa keadaan ke arah suatu komponen yang mana dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dalam memajukan suatu bangsa. Sebagai *agent of change* mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, di lain sisi mahasiswa juga dapat mengontrol jalannya pemerintahan melalui aksi yang bersifat dialogis, demonstratif atau aksi-aksi yang dilakukan pada media sosial, hal demikian adalah sudah kewajiban bagi mahasiswa untuk menjadikan sebuah perubahan baru dan menjaga pemerintah tetap sesuai Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*), yaitu :

a. Agen Perubahan.

Mahasiswa sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang sudah dimiliki dan didapat dari kampus maupun di luar lingkungan kampus. Peran mahasiswa selain pada bidang politik, harus juga dapat melebar pada bidang lain misalnya pada bidang ekonomi, diharapkan bahwa mahasiswa yang berada pada bidang ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari semua lapisan masyarakat.

b. Penjaga Nilai.

Nilai luhur dan mulia perlu dijaga dan dilindungi. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menjaga dan melindungi nilai luhur

yang berkembang dalam bangsa Indonesia. Saat nilai-nilai luhur tersebut diguncang maka peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menjaga dan melindungi dari gangguan baik dari pihak dalam maupun pihak luar.

c. Penerus Bangsa.

Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa yang menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa. Di pundak mahasiswa masa depan bangsa Indonesia ditentukan, peran penting mahasiswa sebagai penerus bangsa adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

d. Pengontrol Sosial.

Mahasiswa juga dapat berperan sebagai pengontrol sosial. Maksudnya adalah mahasiswa memiliki peran pengontrol sosial dalam masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara. Contohnya ketika ada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa, maka mahasiswa mempunyai peran untuk ikut serta dalam memperbaiki peraturan tersebut agar kembali sesuai dengan cita-cita bangsa (Jannah dan Sulianti, 2021).

2.4.2 Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan

Gerakan mahasiswa sepanjang sejarah berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara selalu dalam keadaan siap untuk maju sebagai garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat melalui kekuatan kolektifnya. Kekuatan politik dapat mengorganisasikan dirinya untuk berkonsentrasi

dengan kekuatan politik lain, pengorganisasian tersebut dapat berwujud LSM, kelompok studi, dan organisasi kemahasiswaan (Mufti, 2013).

Munculnya gerakan mahasiswa melalui kebangkitan nasional tahun 1908 dengan semangat national building pada akhirnya termanifestasikan dalam Sumpah Pemuda 1928, gerakan revolusi kemerdekaan Indonesia 1945, gerakan penggulingan Bung Karno tahun 1965-1966, gerakan kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto tahun 1974 dan 1978, hingga gerakan Reformasi 1998 adalah antara andil politik para mahasiswa di Indonesia, keterlibatannya dalam dunia politik tersebut, membuktikan bahwa gerakan mahasiswa Indonesia selalu berperan menjadi kelompok penekan yang menghubungkan kegelisahan rakyat dengan negara (Husin, 2014).

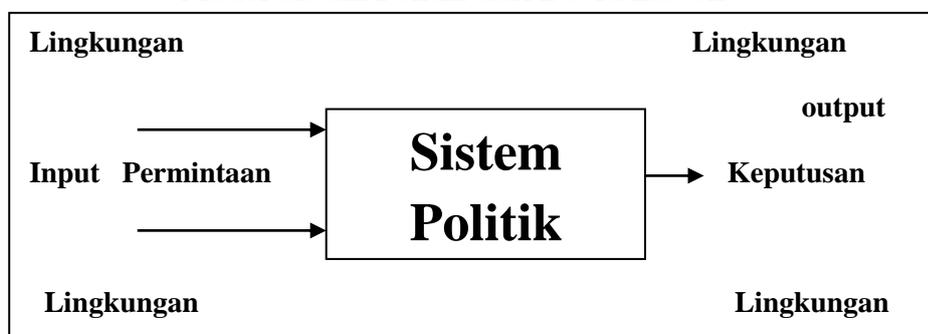
Mahasiswa dapat leluasa menjadi kelompok penekan adalah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi termasuk Indonesia, selaras dengan hal tersebut Key, mengatakan bahwa kelompok penekan (*pressure groups*) hadir sebagai konsekuensi atas adanya demokrasi dalam suatu negara. Berangkat dari hal tersebut bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem yang menerapkan penyebaran kekuasaan (*dispersion of power*) akan melahirkan kebebasan berpolitik pada masyarakat (*self-government*). Dari teori Key tersebut dapat ditarik beberapa ciri kelompok penekan, yaitu: *pertama*, kelompok penekan melakukan aktivitas politik di luar sistem politik formal; *kedua*, dalam menyuarakan kepentingannya, kelompok penekan melakukan tekanan-tekanan politik pada sistem politik

formal untuk memengaruhi suatu kebijakan publik;*ketiga*, kelompok penekan tidak berorientasi menominasikan kandidat untuk memasuki jabatan publik di dalam sistem politik formal (Husin, 2014).

Hadirnya kelompok penekan dapat diposisikan sebagai aktor dan juga masuk ke dalam sistem politik itu sendiri. David Easton menjelaskan bahwa dalam suatu sistem politik terdapat proses masukan (*input*) politik, konversi, atau integrasi di dalam sistem dan kemudian muncul keluaran (*output*) politik dalam bentuk kebijakan publik yang bisa menghasilkan umpan balik (*feed back*). Lebih luas lagi, Easton menambahkan bahwa sistem politik tersebut tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan di mana mereka berada. Lanjutnya, lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu intrasosial dan ekstrasosial, bagian intrasosial adalah bagian lingkungan sosial dan fisik yang terletak di luar batasan suatu sistem politik tetapi tetap ada di dalam masyarakat, sedangkan bagian ekstrasosial menurutnya terletak di luar masyarakat di mana sistem politik berlaku (Husin, 2014). Berikut model sistem politik menurut Easton:

Gambar 2.2

Model Sistem Politik dari David Easton



Sumber : Husni, 2014.

Dalam konteks tersebut, “kelompok penekan” sebagai pemain yang berada di luar sistem politik formal yang berlaku, melakukan tekanan politik dikarenakan mereka menjadi entitas di dalam masyarakat tersebut. Kelompok penekan hadir sebagai “lingkungan intrasosial” bagi sistem politik yang berlaku, Easton memandang bahwa suatu sistem politik, tidak bisa terlepas dari kehidupan politik sebagai sebuah sistem terbuka menerima tekanan dari berbagai lingkungan yang mengelilinginya (Chilcote, 2017).

Pandangan lain datang pada pendekatan Marxis, menurut pandangan Marxis bahwa “kelompok penekan” lebih dimaknai hadir dikarenakan adanya konflik antar kelas. Hal tersebut terjadi dengan asumsi bahwa negara harusnya menjamin kepentingan publik, hanya dikuasai oleh kelompok borjuis dominan, sehingga pada akhirnya kehadiran negara atau suatu sistem politik hanya melayani segelintir kelompok kelas dominan tersebut. Kelompok penekan hadir sebagai bentuk ekspresi kelas bawah (proletarian) untuk menekan kelas borjuis dominan yang menguasai negara dan alat produksi untuk melakukan perubahan politik (Husni, 2014).

2.4.2.1 Kemunculan Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa sebagai kelompok penekan yang menjadi bagian dari penyedia *input* terus menjaga stabilitas gerakannya untuk tetap mendapatkan kepercayaan publik sebagai penyambung rakyat dan negara. Menurut Sanit, daya serap lembaga politik berperan meredakan aktivitas politik mahasiswa, sebagaimana diperlihatkan oleh kenyataan di

masyarakat, kemampuan lembaga politik masyarakat tersebut menyerap aspirasi dan kepentingan mahasiswa untuk mengadakan perubahan, menyebabkan mahasiswa berkesimpulan bahwa misi mereka segera dicapai. Dalam situasi yang demikian gerakan politik mahasiswa tergolong ke dalam *pressure politics*, gerakan mahasiswa berada di luar struktur lembaga politik, dari sana mereka melakukan desakan supaya aspirasi dan perjuangan mereka dipenuhi lewat kebijaksanaan yang dihasilkan melalui lembaga politik (Husin, 2014).

Sedangkan menurut konsep Philip G. Altbach yang telah melakukan studi gerakan mahasiswa di Amerika Serikat pada periode 1960-1980-an, penyebab munculnya gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan adalah adanya dorongan untuk melakukan perubahan. Ia tumbuh karena adanya dorongan mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan. Menurut Altbach ada dua fungsi gerakan mahasiswa sebagai proses perubahan, yaitu menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik. Altbach melanjutkan bahwa terdapat dua segmen yang kemudian dibidik gerakan mahasiswa, *pertama* dia berfokus pada perubahan sosial dengan membangun basis dan wacana di sosial-masyarakat, menerjemahkan permasalahan yang terjadi di dalamnya dan mengambil bagian secara konkret dalam merumuskan solusinya, *kedua*; gerakan mahasiswa pada akhirnya harus memasuki dunia politik dengan

menjadi kelompok penekan dan melakukan dorongan-dorongan kepada pengambil kebijakan untuk memenuhi harapan tersebut (Husin, 2014).

Menurut Denny JA ada tiga kondisi munculnya gerakan mahasiswa; *pertama*, gerakan mahasiswa dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Misalnya pemerintah yang moderat, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan mahasiswa ketimbang pemerintah dengan sistem yang bersifat otoritarian; *kedua*, gerakan mahasiswa timbul karena meluasnya ketidakpuasan akan situasi yang ada. Misalnya terjadinya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin; *ketiga*, gerakan mahasiswa semata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh-tokoh penggerak yaitu yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan (Jubaedah, 2019).

Sedangkan Maiwan mengatakan awal kemunculan gerakan-gerakan sosial termasuk mahasiswa adalah sebagai berikut; *pertama*, perluasan peran pemerintah ke segala bidang kehidupan. Perluasan yang dilakukan oleh pemerintah baik lokal maupun nasional, dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan telah melahirkan tanggapan dari kelompok-kelompok yang merasa perlu terlibat dalam isu tersebut; *kedua*, meratanya tingkat pendidikan dan kesadaran politik, gejala ini menunjukkan

bahwa semakin banyaknya area di mana pemerintah menjadi terlibat, maka semakin banyak pula kepentingan khusus yang berkembang untuk memengaruhi kebijakan; *ketiga*, mencuatnya isu-isu baru yang menjadi keprihatinan umum, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global (Maiwan, 2016).

2.4.2.2. Gerakan Mahasiswa Dalam Memengaruhi Pemerintah

Mahasiswa sebagai kelompok penekan yang memberikan input pada pemerintah sebagai produsen kebijakan, melakukan beberapa cara untuk memengaruhi pemerintah. Menurut Maiwan setidaknya kita bisa mencatat beberapa cara atau strategi yang dipakai untuk memengaruhi pemerintah, yaitu; *pertama*, melakukan dialog atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah, menjalin komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah adalah salah satu cara gerakan mahasiswa memengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan isu yang sedang diperjuangkan, bidang ini lebih merupakan seni yang kerap kali diajarkan pada organisasi termasuk organisasi pemerintah; *kedua*, melalui media massa. Kelompok gerakan biasanya menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik sentimen dan perhatian umum, sehingga pemerintah mengambil kebijakan atas isu tertentu sesuai yang diinginkan, pesan yang disampaikan dapat berupa pesan-pesan, satir, atau pesan lain yang mengundang perhatian publik; *ketiga*, *grass-roots pressure*, di mana kelompok gerakan mahasiswa menggalang dukungan masyarakat lapis

bawah untuk menyampaikan isu tertentu. Misalnya melalui rapat akbar, pawai massal, atau demonstrasi serta lain sebagainya (Maiwan, 2016).

2.4.2.3 Ideologi dan Isu Gerakan Mahasiswa

Terdapat banyak pendefinisian ideologi dalam perkembangan ilmu politik. Dalam konteks membaca garis ideologi dalam gerakan mahasiswa, terdapat beberapa ideologi yang berpengaruh di dalam gerakan mahasiswa yang mempresentasikan gerakan ideologi politik di Indonesia. Ada beberapa ideologi yang mendominasi gerakan mahasiswa, yaitu sebagai berikut :

a. Nasionalisme

Pemahaman nasionalisme mengakar pada pemikiran Soekarno yang dikenal sebagai “Marhaenisme”. Dalam pergerakannya, teori marhaenisme tidak hanya diposisikan sebagai teori politik tetapi juga menjadi teori perjuangan, tujuan dari perjuangan tersebut adalah perbaikan nasib untuk keluar dari sistem kapitalisme dan imperialisme yang mengungkung bangsa. Untuk itu mahasiswa yang menganut marhaenisme harus digerakan dan disadarkan dalam suatu kesatuan pergerakan massa aksi yang radikal.

b. Islam.

Menurut Anders Uhlin, dalam konteks wacana demokrasi, ideologi Islam dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, pemikiran Islam modernis yang ditandai dengan penerimaannya pada wacana

demokrasi mereka memakai bahasa Islam, mereka meyakini bahwa wacana demokrasi sudah ada dalam Islam; *kedua*, pemikiran Islam neo-modernis yang didefinisikan sebagai kaum muslim yang menerima pengaruh barat dan juga tidak melupakan tradisi; *ketiga*, Islam transformis yang merupakan wacana gerakan Islam yang lebih mengedepankan nilai kesetaraan dan keadilan sosial.

c. Sosialisme-Demokrasi.

Sosialisme-Demokrat dibawa oleh Sjahrir sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia. Paham ini yang paling keras melawan ajaran dan gerakan Marxisme-Leninisme, selanjutnya pemikiran Sosial-Demokrat tidak bisa lepas dari teori *Welfare State* (Negara Kemakmuran) yang mendukung hadirnya negara dengan dasar sosialis (kepentingan bersama) yang menjamin kemajuan rakyat, serta jaminan kesehatan (Husin, 2014).

Idelogi gerakan mahasiswa selain menjadi acuan perjuangan, kemudian juga menjadi semacam pisau analisis dalam menentukan arah gerak dalam menanggapi isu-isu sosial-politik. Menurut terdapat beragam isu yang biasa diangkat oleh gerakan mahasiswa khususnya pasca reformasi, yaitu:

a. Kapitalisasi Pendidikan

Kapitalisasi pendidikan menimbulkan komersialisasi sehingga biaya pendidikan semakin mahal dan hanya mendukung pada kepentingan pemodal serta menempatkan kebijakan pendidikan

untuk mendapatkan keuntungan. Isu kapitalisasi pendidikan itu menimbulkan resistensi mahasiswa namun juga aksi pelemahan resistensi, pada resistensi mahasiswa biasanya mahasiswa membuat gerakan berupa demonstrasi kepada pihak kampus.

b. Hak Asasi Manusia

Isu HAM juga tidak luput dari gerakan mahasiswa, kasus-kasus pelanggaran HAM di negara ini dapat ditonjolkan pada dua jenis pelanggaran, yaitu HAM berat seperti pembunuhan massal dan kejahatan manusia, dan HAM biasa yang meliputi pemukulan, pengainayaan, pencemaran nama baik, penghalangan berkespresi dan kehilangan nyawa orang.

c. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Masalah-masalah lingkungan dan SDA yang dihadapi pasca reformasi mulai dari pembakaran lahan gambut, pembalakan liar, peralihan lahan hijau. Secara umum dua pilihan dalam aksi gerakan mahasiswa atas lingkungan hidup dan SDA, yaitu membentuk organisasi pencinta lingkungan dan aksi unjuk rasa jika aksi damai tidak mengalami perubahan yang diharapkan.

d. Isu-isu Lokal

Isu lokal merupakan masalah-masalah yang khusus terjadi di satu wilayah tertentu. Pada perspektif gerakan mahasiswa, contoh yang banyak dilakukan adalah dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), skala kegiatan yang bersifat masif dan terjadi diseluruh kampus,

selain itu ada aksi pemberdayaan seperti pemberdayaan pengamen, pemberantasan buta huruf dan lain sebagainya.

e. Peraturan dan Perundang-undangan.

Fokus peraturan dan Perundang-undangan adalah isu yang paling banyak mengundang aksi massa, alasan dasarnya adalah karena peraturan atau perundang-undangan merupakan instrumen dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga, gerakan mahasiswa biasanya dilakukan tidak pada satu titik tetapi masif pada semua daerah dan memiliki aksi bergelombang (Muzakar, 2019).

2.4.2.4 Faktor Kemunduran Gerakan Mahasiswa

Perubahan situasi sosial-masyarakat memberikan dampak besar bagi berjalannya gerakan mahasiswa, permasalahan demi permasalahan yang terjadi membuat mahasiswa saat ini seperti kehilangan orientasinya sebagai kelompok penting. Ada beberapa faktor mengapa gerakan mahasiswa mengalami kemunduran, yaitu sebagai berikut.

Pertama, perubahan fundamental sistem politik pasca reformasi 1998 dari rezim otoritarian kepada demokratis menjadi peluang sekaligus tantangan bagi gerakan mahasiswa. Sistem politik yang terbuka telah menciptakan kebebasan berekspresi masyarakat dan memberi kesempatan politik bagi lahirnya gerakan mahasiswa, tantangan utamanya adalah sistem desentralisasi yang memberikan daerah memiliki hak otonom dalam mengatur daerahnya sendiri. Gerakan mahasiswa yang terbiasa fokus pada

isu nasional saat ini terbagi menjadi dua fokus, yaitu nasional dan daerah, sehingga yang terjadi adalah kegagalan gerakan mahasiswa dalam merespon sistem baru tersebut.

Kedua, sistem pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja telah merubah orientasi mahasiswa terhadap kondisi sosial dan politik di masyarakat. Tuntutan agar mahasiswa cepat menyelesaikan studinya dengan jadwal perkuliahan yang padat membuat kesempatan mahasiswa untuk mengkaji isu-isu sosial berkurang, sehingga terjadi penerunan minat mahasiswa terhadap organisasi, khususnya yang berorientasi pada kajian isu-isu sosial.

Ketiga, permasalahan internal organisasi dalam hal sumber daya keanggotaan, jejaring komunikasi, dan kepemimpinan. Permasalahan pada basis keanggotaan adalah adanya sikap indisipliner anggota organisasi sehingga membuat pandangan buruk, sehingga yang terjadi gelombang aksi massa dalam melakukan gerakan mahasiswa tidak sebanyak pada masa-masa sebelumnya. Pembinaan internal yang menjadi fokus kemudian membuat organisasi kurang perhatian pada isu-isu sosial yang sedang bergulir.

Keempat, minimnya kajian dan analisa terhadap suatu permasalahan. Hal itu dikarenakan kurangnya dukungan investigasi lapangan yang membuat kajian mahasiswa tidak mendalam dan cenderung bersifat normatif sehingga aksi-aksi yang dilakukan kurang lebih bersifat reflektif dalam bentuk aksi-aksi solidaritas. Kurangnya kajian juga

menyebabkan pembingkaihan isu yang dilakukan tidak maksimal dan tidak mampu meyakinkan target peserta gerakan sehingga gerakan nyata yang harusnya dilakukan menjadi bias, Kondisi demikian menjadikan gerakan mahasiswa menjadi tidak konsisten dan rendah partisipasi gerakan (Muzakar, 2019).

Menurut Prasetyo gerakan mahasiswa hadir sebagai tonggak perlawanan, dan ujung dari gerakan mahasiswa adalah memanen hasil. Panen hasil itu bisa diawali dengan mengembangkan jaringan dan isu gerakan, isu diperluas bukan hanya untuk melucuti kebijakan rezim tetapi juga mendorong secara agresif gagasan-gagasan politik alternatif (Prasetyo, 2015).

2.5 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh organisasi internal dan eksternal kampus, diantaranya adalah HMI dan PMII. Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota yang menjadi wilayah perkembangan dua organisasi tersebut, HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya ikut serta dalam melakukan banyak gerakan baik nasional maupun daerah. Gerakan mahasiswa yang berkembang pada saat ini adalah bagian dari gerakan sosial baru yang tidak berorientasi pada ideologi klasik dan materialisme. Perkembangan gerakan mahasiswa yang terjadi saat ini berfokus pada gerakan yang bercirikan solidaritas dan komitmen anggotanya. Pada kajian gerakan sosial baru, gerakan mahasiswa yang beragam dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah ideologi, partisipan, taktik dan struktur sebagai basis analisisnya.

Dalam melihat pola gerakan HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya didapati empat aspek utama sebagai dasar analisis penelitian yang sebelumnya sudah disebutkan, melalui empat aspek tersebut, HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya mendasari setiap gerakannya dalam merespon permasalahan sosial. *Pertama*, Ideologi sebagai asas yang mendasari dalam menilai sesuai atau tidak sesuai suatu kebijakan diberlakukan dan seperti apa merespon permasalahan yang terjadi, *kedua* partisipan, yaitu bagaimana kekuatan massa dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan dalam melakukan gerakan sosial, *ketiga* taktik, yaitu bagaimana agar gerakan yang dilakukan dapat berhasil, *keempat* yaitu struktur, bagaimana implementasi dari kondisi ideal yang dibentuk melalui kajian panjang. Kemudian dengan empat aspek tersebut barulah terbentuk pola gerakan yang dilakukan oleh HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya, selanjutnya pola gerakan tersebut dianalisis sesuai dengan teori perbandingan sehingga didapati hasil perbandingan pola gerakan sosial HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya.

Gambar 2.3

Kerangka Berpikir

